

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi penahan terjadinya guncangan krisis ekonomi. Melihat peran penting tersebut, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri, serta modern termasuk dukungan akses pendanaan yang semakin luas ke sektor perbankan.

Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung Ina Primiana menyatakan, sebagian besar pelaku UMKM tanpa memiliki informasi dan akses ke pasar global. "Di dalam negeri, pertumbuhan sektor ini tidak berjalan dengan pertumbuhan usaha besar. Ini menunjukkan pengembangan usaha besar tidak melibatkan kontribusi UMKM," kata Ina dalam diskusi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta. Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013. Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi

sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen. (www.kemenperin.go.id diakses tanggal 21-04-2019)

Melihat perkembangan UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini belum disertai akan kesadaran pemilik usaha dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Pemilik UMKM belum memahami akan pentingnya pencatatan laporan keuangan bagi kegiatan bisnisnya. Pencatatan laporan keuangan di sektor UMKM dilakukan secara sederhana, sehingga karakteristik laporan keuangan yang belum berstandar SAK-ETAP dianggap belum dijalankan dengan profesional, hal ini mengakibatkan sulitnya UMKM memperoleh sumber pendanaan dan modal. Proses penyusunan laporan sendiri sebetulnya tidak susah namun yang susah adalah niat untuk membangun suatu laporan. Laporan keuangan sejatinya juga dapat membantu usaha yang di jalankan, dengan adanya laporan keuangan secara jelas maka dapat membantu dalam proses permodalan dengan dapat meminjam kepada bank. Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh UMKM apabila ingin mengembangkan usahanya, karena dengan adanya pencatatan dan pembukuan akan memudahkan UMKM untuk mengetahui perjalanan bisnisnya, kendala-kendala apa saja yang dialami, dan informasi-informasi yang dibutuhkan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Penyusunan laporan keuangan pada UMKM dapat didasarkan pada standar akuntansi keuangan. Seperti halnya standar akuntansi yang dianut oleh perusahaan atau entitas berskala besar, UMKM juga memiliki standar akuntansi yang relevan dan terspesialisasi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan standar akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Namun mengingat definisi UMKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standar tersebut diberi nama Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM, oleh karena itu pengguna SAK-ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UMKM. Penerbitan SAK-ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini adalah sebagai alternatif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit. Dengan harapan, praktisi-praktisi UMKM dapat menyusun laporan keuangannya berdasarkan pemahaman atas SAK-ETAP, sehingga laporan keuangan UMKM dapat terstandarisasi.

Dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya, Dewan Standart Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2016 telah menyusun dan mengesahkan Standart Akuntansi keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penerbitan SAK EMKM ini adalah bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntan, dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

Pada tahun 2009, DSAK IAI telah menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang juga diintensikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Namun seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standart akuntansi yang lebih sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia. SAK EMKM merupakan standart akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Kehadiran SAK EMKM ini di harapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku UMKM mendapat akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan.

Namun saat ini banyak pengusaha UMKM tidak paham hal tersebut yang dianggap tidak penting bagi keberlanjutan usaha mereka. Banyak yang beranggapan kenapa hal itu harus dilakukan sedangkan usaha yang mereka lakukan tetap berjalan, dan penyusunan laporan keuangan di anggap hanya buang-buang waktu dan membuang tenaga. Apalagi hal ini akan menambah lagi pekerjaan untuk menyusun laporan keuangan saja yang sebetulnya laporan keuangan berperan penting dalam membantu usaha yang dilakukan tapi malah tidak memikirkan keberlangsungan usahanya. Beberapa penelitian tentang analisa SAK bagi UMKM telah dilakukan diantaranya :

(Wiadnyana, et al., 2017) menyatakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UD Adhikari mandiri sebatas mencatat pendapatan dan pengeluaran serta masih menggunakan aplikasi pencatatan yang masih mengadopsi aplikasi dari UD Widya Pratama. Pencatatan stok yaitu pencatatan persediaan barang dagang yang dimiliki oleh UD Adhikari Mandiri berupa pencatatan dalam sistem komputer. Pencatatan beban gaji yaitu pencatatan ini dilakukan langsung oleh pemilik perusahaan dengan menggunakan program Microsoft Exel diluar dari sistem pencatatan UD Adhikari Mandiri Selama ini faktor-faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya SAK ETAP pada usaha UD Adhikari Mandiri antara lain, Ketidakmampuan sumber daya manusia yaitu, bagian keuangan beralasan bahwa mereka tidak paham akan ilmu akuntansi dasar bahkan sulit bagi mereka untuk belajar ilmu akuntansi tersebut. Mereka cenderung tidak paham akan tata cara melakukan pencatatan yang sesuai dengan SAK ETAP. Latar belakang pendidikan yaitu, menyimpangnya latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai sehingga tidak sesuai dengan pembagian tugas khususnya pegawai pada bagian keuangan yang berlatar belakang SMA sederajat. Ketersediaan aplikasi komputer yang kurang memadai yaitu,

pencatatan pada UD Adhikari Mandiri terdiri dari dua tipe pencatatan yaitu pencatatan manual dan pencatatan menggunakan aplikasi komputer. Penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada UD Adhikari Mandiri telah diterapkan sesuai dengan SAK ETAP mulai dari tahap penjurnalan hingga penyusunan laporan keuangan

(Widyastuti, 2017) menyatakan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa DisCo belum menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yaitu menuliskan pendapatan dari hasil pembayaran uang jasa bimbingan belajar oleh siswa dan pengeluaran berupa beban dan biaya-biaya pada buku besar yang ditulis secara manual. Kendala yang dialami oleh pemilik usaha dalam menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK-ETAP dilatarbelakangi beberapa faktor internal dan eksternal. Kendala faktor internal merupakan kendala yang timbul dari internal Dis-Co, antara lain kurangnya pengetahuan mencatat laporan keuangan secara lengkap, kurangnya pengetahuan pemilik usaha mengenai tujuan dan manfaat pencatatan keuangan berbasis SAK-ETAP dan terbatasnya pengetahuan pemilik usaha mengenai tujuan laporan keuangan yang dibuat hanya sebagai informasi pribadi pengelola Dis-Co. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan tidak terlaksananya implementasi pencatatan keuangan berbasis SAK-ETAP adalah minimnya pemerintah terutama pembina UMKM untuk mensosialisasikan dan melatih para penggiat UMKM terkait hal tersebut.

(Ramdani, et al., 2018) menyatakan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Pengelola UMKM Warkop hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing Pengelola UMKM Warkop. Pencatatan yang dilakukan Pengelola UMKM Warkop tersebut tidak sesuai dengan siklus akuntansi dapat dikatakan hanya melakukan pencatatan sebatas kas masuk dan kas keluar. Pengelola UMKM Warkop tidak menerapkan SAK-ETAP dalam menyusun laporan

keuangan, karena Pengelola UMKM Warkop kurang memahami SAK-ETAP. Pengelola menganggap pencatatan yang dilakukan sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan.

(Kurniawanysah, 2016) menyatakan Persepsi pengusaha UMKM di Desa Gembongsari mengenai pentingnya keberadaan laporan keuangan, antara lain: pengusaha UMKM merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki; kebutuhan akan penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya. Praktik akuntansi pada UMKM mengacu pada SAK ETAP belum terlaksana disebabkan, keterbatasan pengetahuan akuntansi para pengusaha UMKM sehingga tidak mempraktekkan proses akuntansi yang memadai. Tidak optimalnya penyelenggaraan praktik akuntansi dan pemanfaatan informasi akuntansi pada UMKM selama ini bukanlah semata-mata merupakan kesalahan ataupun kekurangan para pelaku UMKM, tetapi juga dikarenakan belum optimalnya peran serta pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam mendorong dan memfasilitasi praktik akuntansi di UMKM. Secara khusus penerapan akuntansi untuk UMKM di Desa Gembongsari masih memiliki permasalahan yang sama dengan beberapa daerah di Indonesia sehingga solusi dan pendekatan untuk meningkatkan akuntabilitas UMKM harus disusun panduan proses akuntansi berdasarkan ETAP yang *friendly* user dan sistematis oleh pengelola UMKM.

(Ningtyas, 2017) menyatakan bahwa berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa laporan keuangan UMKM Bintang Malam yang disusun peneliti berdasarkan SAK EMKM menyajikan Posisi keuangan yang disajikan dalam neraca per 30 April 2017 menunjukkan total asset perusahaan sebesar Rp 869,585,400 jumlah liabilitas sebesar Rp108,987,500 dan modal sebesar Rp760,592,900 laba bersih perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan pada bulan April 2017 sebesar Rp 75,815,000. Catatan atas laporan keuangan yang menyajikan gambaran umum perusahaan,

pernyataan bahwa penyusunan laporan menggunakan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan yang digunakan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dan disajikan dalam laporan keuangan UMKM Bintang Malam.

(Shonhadji, et al., 2017) menyatakan bahwa usaha jasa laundry mitra tidak melakukan pencatatan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku pada SAK EMKM. Usaha jasa laundry mitra memiliki pencatatan keuangan sebatas pada pemasukan dan pengeluaran laundry, sehingga penerapan akuntansi berdasarkan pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM pada usaha jasa laundry masih sangat lemah. Usaha jasa laundry mitra merasakan adanya kemanfaatan dari program pengabdian masyarakat ini terutama dalam pengelolaan dan manajemen tata buku keuangan yang dikenalkan dan diterapkannya melalui pencatatan akuntansi berdasarkan EMKM. Penyusunan laporan keuangan berbasis microsoft excel terbukti sangat membantu mitra untuk menyelesaikan dari kendala yang ada masih membutuhkan pihak eksternal yang lebih memahami untuk melakukan pencatatan akuntansi pada sistem laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM, sehingga pihak eksternal dapat memberikan kontribusi mengenai seluruh sistem pencatatan keuangan yang sesuai prosedur informasi dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis mitra.

(Anisah, et al., 2018) Menyatakan bahwa ketidaksiapan pelaku UMKM dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan adalah tidak memiliki sumberdaya khusus dilakukan oleh pemilik yang tidak memahami tentang akuntansi dan laporan keuangan. Sebagian diantara pelaku UMKM juga menganggap bahwa laporan keuangan tidak terlalu dibutuhkan karena data yang dikelola adalah data pribadi yang tidak perlu dipertanggungjawabkan pada pihak lain. Beberapa pelaku UMKM mengakui sebenarnya pencatatan akuntansi maupun laporan keuangan bermanfaat untuk menunjang

kinerja usahanya, namun karena kendala yang ada, mereka belum siap menerapkan SAK EMKM pada usaha mereka meskipun beberapa diantaranya pernah memperoleh pelatihan akuntansi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi penerapan sebelum dan sesudah standart akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) pada UD Furniture Jaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penerapan sebelum dan sesudah standart akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) pada UD Furniture Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan membuktikan SAK-EMKM yang memang sudah ada yang menerapkan dan bagi akademisi agar menjadi acuan untuk semakin menggalakan dan memberi wawasan yang di punya tentang dunia akuntansi khususnya dalam pencatatan laporan keuangan umkm

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan mengenai standart akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah pada

UMKM digunakan sebagai sumber informasi dan evaluasi kerja serta semangat untuk belajar dalam mengembangkan kualitas laporan keuangan yang semakin baik.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari pada penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam hal sumber informasi serta dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan strategi bagi pemerintah untuk membantu kemajuan pelaku UMKM agar memiliki tingkat profesional tinggi dan wujud keseriusan UMKM dalam menjalankan usahanya agar lebih besar lagi.